



KTT AS-ASEAN DAN UPAYA MERESPONS ANCAMAN CHINA DAN KOREA UTARA

Poltak Partogi Nainggolan*)

Abstrak

Tidak pernah AS mengundang 10 negara ASEAN untuk KTT yang pertama kali diadakan menjelang berakhirnya Pemerintahan Obama. Upaya menyadarkan ASEAN atas ancaman keamanan yang meningkat drastis akibat militerisasi Laut China Selatan (LCS) dengan gelar rudal dan jet tempur China, dan aksi provokatif misil balistik Korea Utara, serta aktor non-negara teroris internasional, lebih berhasil dicapai AS ketimbang upayanya mendesak Presiden Jokowi bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). AS tampaknya telah mengantisipasi dan bersiap menghadapi reaksi China jika keputusan Mahkamah Internasional menolak klaim teritorial sepihak China atas LCS. AS juga telah siap merespons reaksi agresif Kim Jong-un yang rawan dimanfaatkan sebagai "political gambit" oleh penguasa China.

Pendahuluan

Pelaksanaan KTT AS-ASEAN di Sunnylands, California, mulai 15 Februari 2016 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik, keamanan, dan ekonomi global. Pertemuan puncak ini merupakan pertemuan yang mendesak dalam bentuk *retreat* yang digelar Presiden Obama, yang untuk pertama kalinya AS mengundang 10 negara ASEAN, di tempat Obama pernah menjamu Presiden China, Xi Jinping. Apa relevansinya pelaksanaan *retreat* dengan semakin meningkatnya ancaman keamanan global yang datang dari China di berbagai kawasan? *Retreat* dalam bentuk KTT itu dilakukan di luar jadwal pertemuan rutin ASEAN dan merupakan inisiatif langsung Presiden Obama menjelang

berakhir masa jabatannya tahun ini. Juga, apa hubungannya *retreat* dengan meningkatnya ancaman terorisme global yang datang dari teroris ISIS/IS, yang juga dibahas dalam KTT?

Info hubungan internasional terkini dan kajian singkat ini mengulas relevansi KTT AS-ASEAN dan kaitannya dengan ancaman global yang datang dari China yang tumbuh sebagai negara adidaya yang terus memberikan ancaman di kawasan dan terhadap kepentingan global AS. Mengingat hal ini menyangkut juga ancaman yang datang dari aktor non-negara, yakni (kelompok) teroris internasional, kajian ini juga akan membahas ancaman keamanan yang timbul dari perspektif konvensional dan nonkonvensional.

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. E-mail: pptogin@yahoo.com.



Bahaya Konflik Terbuka di LCS

Retreat dikemas dengan nama *US-ASEAN Leaders Summit bertemakan Protecting Peace, Prosperity, and Security in the Asia Pacific*, yang menggambarkan tujuan KTT. Pelaksanaan KTT di California itu dilakukan menjelang ditetapkannya putusan tetap Mahkamah Arbitrase PBB mengenai status klaim teritorial sepihak China pada April-Mei 2016 yang akan datang. Klaim sepihak ini dikenal sebagai *nine dashes lines* yang mulai diintroduksi China 2 tahun lalu, namun kemudian digugat Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Filipina sendiri optimis memenangkan gugatan, yang jika itu terjadi, China harus menghormati putusan tersebut.

Pemerintah China menentang penyelesaian sengketa yang dibenarkan masyarakat dunia melalui jalur hukum internasional ini, sementara sebaliknya Pemerintah Filipina tetap menolak mentah-mentah solusi bilateral yang diinginkan China. Presiden Aquino III tidak percaya Pemerintah China mau menjalankan mekanisme diplomasi secara elegan. Presiden Aquino III khawatir Pemerintah China kian menggunakan tekanan militer dan intimidasi dalam solusi bilateralnya ini.

Upaya militerisasi Woody Island di LCS, yang diperebutkan dengan Taiwan dan Vietnam, dengan gelar sistem rudal pertahanan udara tercanggih China, memperkuat keraguan Aquino III dan *claimants* LCS lainnya atas solusi diplomasi bilateral. Alasan bahwa China telah membangun pulau kecil tersebut -dengan fasilitas kota dan lebih provokatif lagi, bandara militer- tampak dibuat-buat. Argumen ini tetap ditolak negara lain yang terlibat saling klaim di LCS, dan bukan pengklaim, seperti AS dan Jepang yang berkonflik teritorial dengan China di Laut China Timur. Proliferasi melalui gelar rudal kian memperjelas maksud China untuk melakukan kontrol di perairan internasional, yang akan diikuti dengan deklarasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ). Oleh analis Australia dan AS, China dinilai telah melanggar janjinya untuk tidak melakukan militerisasi wilayah itu. Kepala *US Pacific Command*, Laksamana Harry Harris, bahkan mengatakan China telah mengubah lanskap operasional dengan menggelar jet tempurnya di wilayah yang diperebutkan 6 negara itu.

Penempatan sejumlah misil balistik di Woody Island di Paracels, yang kemudian diakui Pemerintah China sudah lama digelar di sana, harus diantisipasi jika putusan Mahkamah Internasional memenangkan gugatan arbitrase Filipina dan menolak klaim teritorial China di LCS. Putusan seperti itu akan membuat pemerintah China tersudutkan posisinya sebagai negara adidaya. AS tampaknya telah siap dengan mengumpulkan seluruh anggota ASEAN dalam KTT di California untuk membahas segala skenario yang mungkin terjadi, terutama yang bersifat destruktif dan dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan. Mengingat LCS adalah jalur navigasi kapal-kapal pembawa kebutuhan logistik dunia yang tersibuk.

Setiap reaksi negatif militer China diperhitungkan implikasi dan sekaligus responsnya oleh dunia -khususnya AS, mitra dekat ASEAN- yang selama ini berperan sebagai polisi dunia dan penjaga kawasan. Langkah China dinilai sangat rawan menimbulkan risiko salah perhitungan yang berakibat pada perang misil balistik AS dan China di LCS, yang sebelumnya diragukan terjadi.

Bahaya Serangan Rudal Nuklir di Asia Timur

KTT AS-ASEAN itu juga telah dibayang-bayangi keputusan AS untuk membuat payung perlindungan misil di Asia Timur terhadap ancaman dari berbagai bentuk uji coba dan kemungkinan serangan nuklir Korea Utara (Korut). Ancaman ini tidak main-main karena Presiden Korut, Kim Jong-un, terus meningkatkan uji coba rudal nuklirnya. Situasi ini meningkatkan ancaman pada Korea Selatan (Korsel) dan Jepang, dua sekutu dekat AS, walaupun AS sendiri masih meragukan kemampuan pengembangan senjata nuklir Korut. Namun, gelar empat pesawat tercanggih AS, F-22, di langit Korsel untuk menangkal serangan rudal balistik Korut menunjukkan tingkat kekhawatiran AS atas stabilitas keamanan di LCT, seperti halnya di LCS.

China merasa terganggu dengan kehadiran 'payung penangkal nuklir' AS, yang juga dapat digunakan untuk melakukan serangan balik. Korut selama ini dikenal sebagai sekutu China yang menjalankan kepentingan *patron*-nya itu di kawasan Asia Timur. AS telah mengantisipasi dan tengah

bersiap terhadap kemungkinan munculnya *proxy war* China di kawasan itu.

Antisipasi ini rasional sebab China memiliki sengketa teritorial dengan Jepang dan berkepentingan mempertahankan klaimnya atas Kepulauan Senkaku. Pengalaman sejarah pahit di bawah pendudukan Jepang telah memperkeras sikap China untuk mempertahankan mati-matian kepulauan itu dari bekas penjajahnya. Begitu pula dengan Jepang yang berusaha keras mempertahankan klaim teritorialnya. Untuk itu, sistem pertahanan anti-misil AS, sangat melindungi kepentingan Jepang karena dapat dimanfaatkan untuk menciptakan penangkalan terhadap kemungkinan serangan rudal nuklir jarak jauh Korea Utara maupun China, melalui *proxy war*.

TPP dan Ancaman Terorisme Internasional

KTT AS-ASEAN semula fokus pada upaya meningkatkan kesiapan dalam merespons ancaman serangan terorisme ISIS/IS yang semakin mengglobal. Momentum ini tepat, karena Indonesia -sebagai negara besar dalam ASEAN yang baru saja mengalami serangan pengikut ISIS/IS yang berasal dari dalam negeri (*homegrowing terrorists*)- sejauh ini dinilai berhasil menangani dan menangkal aksi-aksi lanjutan mereka. Presiden AS mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang cepat mengatasinya dan meminta Presiden Jokowi sebagai pembicara dalam *retreat* untuk berbagi pengalaman. Forum KTT berperan penting dalam perang melawan terorisme global melalui deradikalisasi.

Selain telah dimanfaatkan Presiden Obama untuk membentuk front persatuan melawan China atas ambisi teritorialnya, terutama di LCS, KTT telah dimanfaatkan untuk kampanye memperluas blok perdagangan di kawasan lewat *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Negara yang telah tergabung TPP antara lain China dan Indonesia dan sekutu-sekutu AS, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan hampir seluruh anggota ASEAN. Karena itulah dalam rangka membangun *containment* terhadap kepentingan China -termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan, yang menjadi pemicu agresivitas China di bidang militer dan nafsu perluasan teritorialnya- Presiden Obama gigih mendekati Presiden Indonesia Jokowi

agar segera masuk bergabung TPP.

Meningkatnya tekanan domestik, khususnya dari kalangan LSM, seperti *Institute for Global Justice* (IGJ) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta parlemen, telah memaksa Presiden Jokowi melunakkan sikapnya, sehingga Indonesia belum memutuskan bergabung dalam TPP. Tekanan domestik menguat sehingga Jokowi perlu memperhitungkan kemampuan Indonesia melakukan liberalisasi yang diinginkan TPP, yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan negara melindungi hajat hidup warganya. Untung ruginya harus dikalkulasikan lagi secara cermat, sehingga Indonesia perlu waktu 2-3 tahun lagi untuk kesiapannya bergabung.

Peran Parlemen

Untuk mengurangi eskalasi ketegangan yang memuncak, parlemen di tingkat global dan kawasan harus dapat merespons situasi ini dengan memanfaatkan modalitas yang ada selama ini, melalui *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), dan juga *Asian Parliamentary Assembly* (APA). Di IPU, grup nasional Asia Pasifik dapat didorong untuk menggelar sidangnya, tidak hanya oleh salah satu negara yang terlibat dalam konflik, tetapi juga oleh negara berpengaruh dan besar di kawasan, seperti Indonesia dan Jepang. Di AIPA, tata tertibnya mengenal sidang darurat jika diperlukan. AIPA bisa merekomendasikan dan mendorong *High Council ASEAN* untuk mengambil langkah darurat. Perlu diperhatikan, perkembangan LCS kini menjadi *test* bagi 3 kekuatan besar, yakni AS, China, dan ASEAN.

Sementara itu, APA sebagai sebuah majelis parlemen negara-negara Asia seharusnya juga dapat mengambil sikap dan tidak membiarkan situasi berkembang semakin anarkis dan rawan pecah konflik militer terbuka. Di sini, negara-negara anggotanya, baik yang di Asia Pasifik maupun non-Asia Pasifik, dapat mendorong sidang Komisi Politik menyiapkan sebuah resolusi untuk segera mendorong peredaan ketegangan (*détente*). Selain itu, berbagai forum bilateral bisa dijalankan Parlemen Indonesia (DPR RI), terutama Komisi I, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), untuk melakukan diplomasi parlemen meredam konflik ke

berbagai organisasi regional, pemerintah, dan parlemen nasional negara-negara yang terlibat konflik. Langkah serupa yang sebelumnya telah efektif dilaksanakan dalam memerangi teroris internasional dapat diadopsi dalam meningkatkan kerja sama ekonomi regional.

Penutup

AS melihat absennya sentralitas kepemimpinan dalam ASEAN dan vakumnya kehadiran negara adidaya di luar China di kawasan selama ini telah membuat kian agresif dan provokatifnya ekspansi ekonomi dan militer China, dan manuver-manuver angkatan bersenjata yang sangat provokatif di kawasan. Untuk itulah, AS mendorong munculnya setralitas kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Jokowi di lingkup ASEAN, selain AS akan hadir kembali secara lebih intensif melalui *Asia pivot*-nya untuk menciptakan perimbangan kekuatan dengan kebijakan *rebalancing*.

PBB telah menjatuhkan sanksi baru embargo yang lebih ketat atas Korut, tetapi beberapa minggu dan bulan ke depan di tahun 2016 ini tampaknya masih akan terus diwarnai eskalasi ketegangan di kawasan yang dipicu manuver militer China dan Korut yang amat provokatif, masing-masing di LCS dan LCT. Upaya Vietnam melancarkan protes atas gelar rudal balistik China di LCS ke PBB, dan persiapan serta reaksi militer China mengantisipasi dan menolak putusan Mahkamah Internasional di Den Haag yang mungkin akan menolak klaim teritorialnya di LCS, mewarnai perubahan lingkungan strategis lebih jauh di kawasan dan di tingkat global. Demikian juga dengan sikap Filipina menyita kapal Korut di perairannya, *Subic Bay*, pada 4 Maret 2016 lalu. Sementara itu di LCT, AS dan Korsel telah menggelar latihan militer bersama yang memperkeruh situasi.

Respons parlemen di kawasan untuk bisa segera melakukan *détente* langsung secara efektif, ditunggu oleh masyarakat dunia, di tengah sikap skeptis, mengingat selama ini parlemen cenderung menunggu pemerintah. Sementara, diplomasi multijalur hanya dapat dijalankan jika parlemen mau aktif dan mengambil inisiatif cepat sebelum masalah berkembang genting. Diplomasi parlemen benar-benar ditantang eksistensinya, apakah sebagai komplementer

dalam hubungan internasional ataukah dapat menjadi penentu perkembangan di tingkat regional dan global?

Referensi

- “Beijing Militerisasi Woody,” *Kompas*, 18 Februari 2016: 10.
- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, Barry, and Ole Waever. 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- “China Kirimkan Jet Tempur di Paracels,” *Republika*, 25 Februari 2016: 13.
- “China’s Missile Provocations,” *International NY Times*, February 19, 2016: 8.
- “Empat F-22 di Angkasa Korsel,” *Kompas*, 18 februari 2016: 9.
- Feith, David. “China’s Proliferation Rap Sheet.” *The Wall Street Journal*, February 26-28, 2016: A13.
- Gale, Alastair, “Korea Tensions Surge as Exercises Begin”, *The Wall Street Journal*, March 8, 2016: A3.
- Gale, Alastair and Cris Larano, “Philippines Seizes North Korea Ship,” *The Wall Street Journal*, March 7, 2016: A4.
- “KTT ASEAN-AS: Perlu Stabilitas Lawan Terorisme,” *Kompas*, 18 Februari 2016: 1 dan 15.
- Oegroseno, Arif Havas. “South China Sea a test for three major powers,” *The Jakarta Post*, March 8, 2016: 2.
- Sipahutar, Tassia. “Jokowi softens stance on TPP trade deal,” *The Jakarta Post*, February 17, 2016: 1.
- “Tiongkok Akui Senjata di Wilayah Sengketa,” *Media Indonesia*, 19 Februari 2016: 8.
- “Tiongkok Harus Hormati Putusan,” *Pikiran Rakyat*, 1 Maret 2016: 7.